

DS:6302-7074-2004-8782

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 005.03.2.099137/2025

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

Revisi ke 03
Tanggal : 21 Maret 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
- 2. Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
- 3. Provinsi : (05) JAWA TIMUR
- 4. Kode/Nama Satker : (099137) PENGADILAN NEGERI LAMONGAN
- Sebesar : Rp. 134.500.000 (SERATUS TIGA PULUH EMPAT JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
- 03.04 PERADILAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

- 005.03.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
- 005.03.BF.1049 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Jumlah Uang

Rp. 134.500.000
Rp. 134.500.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|-------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 134.500.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNB | Rp. | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| - PNB TA Berjalan | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| | | | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- 1. KPPN BOJONEGORO (073) Rp. 134.500.000

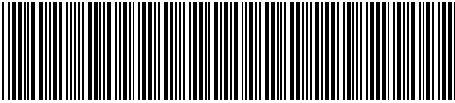
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
PLH. DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
SUAHASIL NAZARA
NIP. 197011231999031006

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099137/2025
I A. INFORMASI KINERJA



DS:6302-7074-2004-8782

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode>Nama Satker : (099137) PENGADILAN NEGERI LAMONGAN

										Halaman : I A. 1
Program	:	005.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum							134.500.000
Kegiatan	:	1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum							134.500.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:									
Klasifikasi Rincian Output	1	:	1049.AEA	Koordinasi		2,00	kegiatan		1.500.000	
Rincian Output	:	01	AEA.001	Pembinaan dan Pengawasan Aparatur Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum		2.00	kegiatan		1.500.000	
Klasifikasi Rincian Output	2	:	1049.BCA	Perkara Hukum Perseorangan		231,00	Perkara, Berkas Perkara		105.000.000	
Rincian Output	:	01	BCA.U03	Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di wilayah Barat		231.00	Perkara		105.000.000	
Klasifikasi Rincian Output	3	:	1049.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan		80,00	Orang		28.000.000	
Rincian Output	:	01	QBA.032	Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum (PN)		80.00	Orang		28.000.000	

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099137/2025
I B. SUMBER DANA



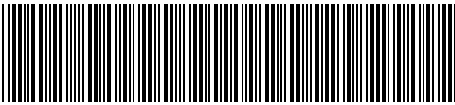
Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode>Nama Satker : (099137) PENGADILAN NEGERI LAMONGAN

			Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	134.500.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
1. Rupiah Murni	Rp.	134.500.000		(2) RPLN	US\$	0 Rp.
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0 Rp.
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099137/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:6302-7074-2004-8782

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode>Nama Satker : (099137) PENGADILAN NEGERI LAMONGAN
Kewenangan : (KD)

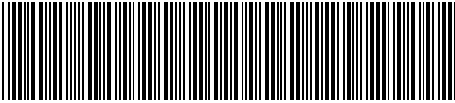
Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
099137	PENGADILAN NEGERI LAMONGAN	-	134.500	-	-	-	134.500		
005.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	134.500	-	-	-	134.500		
1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	-	134.500	-	-	-	134.500		
1049.AEA	Koordinasi (05.29 JAWA TIMUR / KAB. LAMONGAN)	-	1.500	-	-	-	1.500	05 . 29	
01	RM	-	1.500	-	-	-	1.500	073@	
1049.BCA	Perkara Hukum Perseorangan (05.29 JAWA TIMUR / KAB. LAMONGAN)	-	105.000	-	-	-	105.000	05 . 29	
01	RM	-	105.000	-	-	-	105.000	073	
1049.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan (05.29 JAWA TIMUR / KAB. LAMONGAN)	-	28.000	-	-	-	28.000	05 . 29	
01	RM	-	28.000	-	-	-	28.000	073	
JUMLAH		-	134.500	-	-	-	134.500		

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099137/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:6302-7074-2004-8782

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode>Nama Satker : (099137) PENGADILAN NEGERI LAMONGAN

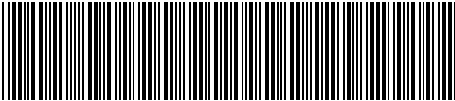
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	099137	PENGADILAN NEGERI LAMONGAN													
		RENCANA PENARIKAN DANA	7.991	11.592	7.541	10.039	10.039	10.039	13.630	11.080	11.080	11.080	13.162	17.228	134.500
		BELANJA BARANG	7.991	11.592	7.541	10.039	10.039	10.039	13.630	11.080	11.080	11.080	13.162	17.228	134.500
		Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	7.991	11.592	7.541	10.039	10.039	10.039	13.630	11.080	11.080	11.080	13.162	17.228	134.500
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	7.991	11.592	7.541	10.039	10.039	10.039	13.630	11.080	11.080	11.080	13.162	17.228	134.500
		PERKIRAAN PENERIMAAN	3.754	3.754	3.754	3.754	3.754	3.754	3.754	3.754	3.754	3.754	3.754	3.760	45.054
		- PNBP (425232)	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	37	400
		- PNBP (425233)	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130	13.560
		- PNBP (425239)	2.591	2.591	2.591	2.591	2.591	2.591	2.591	2.591	2.591	2.591	2.591	2.593	31.094

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099137/2025
IV A. B L O K I R



DS:6302-7074-2004-8782

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [03] Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : [05] JAWA TIMUR
Kode dan Nama Satker : [099137] PENGADILAN NEGERI LAMONGAN

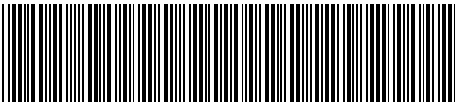
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
099137	PENGADILAN NEGERI LAMONGAN		
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 750		
	52 Belanja Barang Rp. 750		
005.03.BF 1049	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Peningkatan Manajemen Peradilan Umum		
1049.AEA	Koordinasi		
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 750		
	Efisiensi Anggaran		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099137/2025
IV B. C A T A T A N



DS:6302-7074-2004-8782

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [03] Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : [05] JAWA TIMUR
Kode dan Nama Satker : [099137] PENGADILAN NEGERI LAMONGAN

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002